

ABSTRAK

Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah dan damai. Proses penggabungan kepentingan menjadi salah satu fungsi partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Proses ini merupakan bagian dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Partai politik menghimpun aspirasi dan kehendak masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini lalu dimasukkan ke dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan sebagai suatu kebijakan umum. Oleh demikian, maka menarik untuk dibahas mengenai bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan apa saja faktor yang menjadi penghambat bagi pelaksanaannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Partai politik sebagai penyangga pilar demokrasi sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan pendidikan politik di masyarakat dari pusat hingga daerah-daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik di Indonesia memiliki arti sebagai wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik PDI Perjuangan khususnya yang berada Kabupaten Klaten memiliki sifat agregasi, aspirasi, dan kepentingan guna memenuhi upaya-upaya membentuk standar kualifikasi Partai. Sasaran pendidikan politik adalah masyarakat baik kepada sayap-sayap organisasi partai, kader partai dan masyarakat umum. Bentuk dari pendidikan politik yang telah dilaksanakan PDI Perjuangan Kabupaten Klaten meliputi sarasehan, workshop, diskusi interaktif, dan sosialisasi.

Kata kunci: Partai Politik, PDI Perjuangan, dan Pendidikan Politik.

ABSTRACT

As an organization, political parties are ideally intended to activate and mobilize the people, represent certain interests, provide a way of compromise for competing opinions, and provide maximum political leadership legally and peacefully. The process of merging interests is one of the functions of political parties in accordance with Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. This process is part of the function of political parties as a means of political education. Political parties gather the aspirations and will of the people to be formulated as a policy proposal. The proposal of this policy then put into the party program to be fought for or delivered through parliament to the government so that it was made a general policy. Thus, it is interesting to discuss about how PDI Perjuangan is carrying out the function of political education to the community and what factors are the obstacles to its implementation.

The approach method used in this study is a normative juridical approach method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be examined by conducting a search of the rules and the literature relating to the problem under study.

Political parties as a pillar of democracy are very important to ensure the continuity of political education in the community from the center to the regions both at the provincial and district / city levels. PDI Perjuangan as one of the political parties in Indonesia means as a forum for political communication, developing and strengthening the political participation of the people. PDI Perjuangan political education especially in Klaten Regency has the nature of aggregation, aspirations, and interests in order to fulfill efforts to establish Party qualification standards. The goal of political education is society both to the wings of party organizations, party cadres and the general public. Forms of political education that have been implemented by PDI Perjuangan Klaten Regency include gatherings, workshops, interactive discussions, and socialization.

Keywords: Political Parties, PDI Perjuangan, and Political Education.